

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PBB merupakan organisasi internasional yang resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945, ketika beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Cina menandatangani piagam PBB.¹ PBB didirikan setelah kegagalan LBB untuk mencegah terjadinya perang dunia kedua. Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan yang tercantum didalam piagam PBB yaitu, untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan bersahabat antar negara, menggalakkan kemajuan sosial, taraf hidup yang lebih baik dan HAM.² Untuk itu, PBB banyak diminta untuk dapat menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di dunia internasional agar tidak menjadi peperangan.³

Terjadi perubahan pola konflik selama tahun 1990an, dimana banyak konflik yang terjadi berlangsung didalam suatu negara, bukan konflik antar negara.⁴ Artinya pasca era perang dingin konflik yang terjadi didominasi oleh konflik internal negara, bukan konflik antar negara. Keterlibatan PBB dalam sejumlah konflik internal, khususnya konflik etnis yang terjadi diberbagai negara sesuai dengan tujuan PBB dalam piagam pasal 1, yaitu untuk

¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Pengetahuan Dasar Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa* (New York, 2000), hal.71

² Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Citra dan Kenyataan PBB* (New York:Departemen Penerangan Umum PBB), hal.3

³ *Ibid.*

⁴ *Perserikatan Bangsa-Bangsa, Op. Cit.*

memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk memajukan serta mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan dasar bagi semua umat manusia.⁵ Berbagai konflik etnis yang terjadi saat ini seringkali menimbulkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Hak Asasi Manusia yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Menghadapi hal itu, PBB meningkatkan jangkauan instrumentasi yang berada dibawah komandonya, dengan memberi tekanan pada pencegahan konflik. PBB secara terus-menerus mengadaptasi operasi-operasi pengawasan perdamaian. Semakin melibatkan banyak organisasi regional dan memperkuat pembangunan perdamaian pasca konflik.⁶ Untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM dan menyelesaikan konflik etnis, PBB melalui Dewan Keamanan banyak membentuk operasi pengawasan perdamaian yang kompleks.

Sejak berdiri tahun 1945 PBB banyak membantu negara-negara dalam mengakhiri konflik sipil yang terjadi dengan membentuk operasi pengawasan perdamaian atau PKO (*Peace Keeping Operation*). Salah satu operasi pengawasan perdamaian (*Peace Keeping Operation*) yang dibentuk PBB adalah United Nations Assistance Mission for Rwanda atau UNAMIR. UNAMIR didirikan pada tanggal 5 Oktober 1993 oleh Dewan Keamanan PBB melalui resolusi No.872 (1993) untuk membantu Rwanda dalam menyelesaikan konflik etnis yang terjadi dibawah komando Brigadir Jendral

⁵ Dina I. Shelton, *Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity*, Vol 1,2,3, Thomson Gale, New York, San Fransisco, San Diego, New Haven, Conn, Waterville, Maine, London, Munich, 2005

⁶ *Perserikatan Bangsa-Bangsa. Op. Cit.*

Romeo Dallaire.⁷ Rwanda adalah salah satu negara yang terletak di Afrika Tengah dan berbatasan dengan Uganda, Kongo, Tanzania, dan Burundi. Konflik yang terjadi di Rwanda merupakan konflik antar etnis yaitu antara Hutu dan Tutsi. Konflik etnis yang terjadi di Rwanda menarik perhatian dunia internasional karena menyebabkan terjadinya Genosida dan banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh suku Hutu terhadap suku Tutsi.

Konflik etnis yang terjadi di Rwanda bermula pada saat Rwanda di jajah oleh Bangsa Eropa. Belgia merupakan salah satu negara yang menjajah Rwanda pada tahun 1916.⁸ Belgia menerapkan sistem diskriminasi suku yang ada di Rwanda yaitu Hutu, Tutsi, dan Twa. Suku Tutsi yang merupakan minoritas di anggap Belgia sebagai suku yang superior dibanding suku lainnya. Hal ini dikarenakan menurut Belgia suku Tutsi memiliki fisik yang mirip dengan orang Eropa. Belgia juga memberikan hak-hak istimewa terhadap suku Tutsi baik dalam pendidikan maupun pemerintah. Berbeda dengan suku Hutu yang merupakan mayoritas suku di Rwanda dijadikan sebagai kaum rendahan seperti buruh dan pekerja kasar lainnya dan tidak diberikan hak dalam pendidikan maupun pemerintahan.

Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Belgia menimbulkan ketidakstabilan dalam negeri karena adanya kecemburuan sosial antara suku Hutu dan Tutsi dan memicu konflik atau perang saudara di Rwanda. Suku Hutu berusaha keluar dari tekanan diskriminasi, sehingga muncul gerakan perjuangan meraih kemerdekaan. Akhirnya pada tahun 1959 terjadi revolusi

⁷ The United Nations, *The United Nations and Rwanda 1993-1996* (New York,1990), hal.90

⁸ History World, " *History Rwanda* ",(diakses pada tanggal 20 November 2015) diunduh melalui <http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ad24>

Hutu yang mengakibatkan kekacauan di Rwanda.⁹ Akibat banyaknya tekanan dan kekacauan yang terjadi akhirnya Belgia mengganti setengah penguasa Tutsi dengan Hutu. Suku Hutu mulai menguasai Rwanda setelah kemenangan PERMEHUTU partai dari suku Hutu yang memenangkan pemilu tahun 1961. Belgia kemudian memberikan kemerdekaan kepada Rwanda pada 1 Juli 1962 dengan Gregoire Kayibanda sebagai Presiden pertama Rwanda yang berasal dari suku Hutu.

Gregoire Kayibanda sebagai Presiden pertama Rwanda berkuasa dari tahun 1962-1973. Pemerintahan Presiden Kayibanda menerapkan sistem kartu identitas yang dilakukan pada saat kolonialisme untuk mendiskriminasi Tutsi. selain itu Presiden Kayibanda juga berusaha mempromosikan suku Hutu. Akibatnya konflik terus terjadi antara Hutu dan Tutsi selama periode ini. Adanya ketakutan kebangkitan suku Tutsi akibat diskriminasi yang dilakukan Presiden Kayibanda mendorong Menteri Pertahanan Rwanda Mayjen Juvenal Habyarimana melakukan kudeta militer pada Juli 1973. Akibat kudeta ini Presiden Gregoire Kayibanda lengser dari kedudukannya dan digantikan oleh Juvenal Habyarimana. Pada masa kekuasaan Presiden Habyarimana (1973-1994) menerapkan sistem partai tunggal yang merupakan partai dari suku Hutu dan menerapkan sistem diskriminasi etnis.

Masa dekolonisasi membawa Tutsi pelan-pelan terpinggirkan dari Rwanda, karena Rwanda telah didominasi oleh suku Hutu. suku Tutsi yang mendapatkan diskriminasi dan kekerasan akhirnya banyak mengungsi ke

⁹ Frontline, "*Rwanda A Historical Chronology*", (diakses pada tanggal 22 desember 2015) diunduh melalui <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/rwanda/etc/cron.html>

negara-negara sekitar Rwanda. Pada tahun 1990, suku Tutsi yang berada di pengungsian membentuk Rwanda Patriotic Front atau RPF di Uganda. Mereka adalah sebuah kelompok militer yang terlatih yang dipimpin oleh Paul Kagame.¹⁰ RPF menginginkan agar pemerintah Rwanda memperhatikan nasib jutaan pengungsi Rwanda yang menjadi diaspora perang sipil dan membentuk pemerintahan nasional yang kekuasaannya terbagi atas dua etnis di Rwanda.¹¹ Namun, keinginan RPF tersebut ditolak oleh Presiden Habyarimana. Hal ini kemudian mengakibatkan RPF melakukan invansi ke Rwanda pada Oktober 1990 dipimpin oleh Paul Kagame.

Invasi yang dilakukan oleh RPF membawa Rwanda kepada perang sipil dan banyak menyebabkan korban jiwa. Dibawah banyak tekanan Presiden Habyarimana akhirnya mau bernegosiasi dengan RPF untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Melalui serangkaian negosiasi yang diadakan di Tanzania akhirnya kedua belah pihak yang bertikai yaitu Presiden Habyarimana dan RPF menandatangani kesepakatan damai Arusha pada 4 Agustus 1993. Inti dari isi perjanjian damai Arusha adalah mengenai *power sharing* atau pembagian kekuasaan antara Hutu dan Tutsi untuk mengakhiri konflik panjang antara dua etnis tersebut. Setelah kesepakatan tercapai, kedua belah pihak meminta PBB untuk mengawasi implementasi perjanjian tersebut. Dewan Keamanan PBB akhirnya membentuk UNAMIR dengan resolusi 872

¹⁰ Sidik Jatmika, *Hubungan Internasional di Kawasan Afrika*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2015 hal.68.

¹¹ Budi Winarmo, *Isu-isu Global Kontemporer* (Yogyakarta: CAPS, 2014), hal.235.

(1993).¹² Awalnya UNAMIR diberi mandat oleh PBB untuk membantu pelaksanaan perjanjian Arusha ditandatangani pada bulan Agustus 1993. Ada beberapa mandat utama yang diberikan kepada UNAMIR yaitu:¹³

1. Untuk membantu dan memastikan keamanan ibukota Kigali
2. Untuk memantau perjanjian gencatan senjata
3. Untuk memantau selama periode akhir pemerintah transisi sampai pemilu selanjutnya

Konflik yang terjadi di Rwanda berada dalam puncaknya pada tanggal 6 April 1994, ketika pesawat Presiden Habyarimana ditembak jatuh saat akan mendarat di Kigali dan menewaskan Presiden Habyarimana dan Presiden Cyprien Ntaryamira dari Burundi. Mereka baru saja menghadiri pertemuan di Tanzania untuk membahas mengenai perkembangan perdamaian di Afrika Tengah khususnya di Rwanda.

Peristiwa tersebut langsung memicu pembantaian etnis besar-besaran di Rwanda yang dilakukan oleh suku Hutu terhadap suku Tutsi. Pembunuhan dilakukan terhadap kurang lebih 800.000 hingga 1 juta suku Tutsi dan Hutu moderat oleh sekelompok ekstrimis Hutu yang dikenal sebagai interahamwe yang terjadi dalam periode 100 hari pada tahun 1994.¹⁴ Mayat-mayat suku Tutsi dibuang ke sungai dan para pembunuh mengatakan bahwa orang-orang akan dikirim kembali ke Ethiopia, tempat asal suku Tutsi.¹⁵ Di dunia internasional, pembunuhan ini dikenal sebagai Genosida Rwanda. Kehadiran

¹² United Nations, "*UNAMIR Background*", (diakses pada tanggal 24 November 2015) diunduh melalui <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamirFT.htm>

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Budi Winarmo, Op.Cit.*

¹⁵ *Ibid.*

UNAMIR di Rwanda untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi tidak membuahkan hasil yang baik terhadap upaya perdamaian. Konflik justru semakin meningkat hingga terjadi genosida. Adanya genosida yang terjadi di Rwanda menunjukkan bahwa UNAMIR telah gagal untuk menyelesaikan misinya dalam mewujudkan perdamaian konflik etnis di Rwanda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diangkat rumusan masalah yaitu : *Mengapa UNAMIR (United Nations Assistance Mission for Rwanda) gagal menjalankan perannya dalam misi perdamaian konflik etnis di Rwanda dan mencegah terjadinya genosida ?*

C. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas pokok permasalahan diatas, penulis menggunakan pendekatan dengan Teori Efektifitas Rezim yang dikemukakan oleh Arild Underdal seorang ilmuwan politik dibidang analisis pembuatan kebijakan Universitas Oslo (1982).

Teori Efektifitas Rezim

Dalam bukunya yang berjudul *One Qustion Two Answers*, Arild Underdal menjelaskan bahwa suatu organisasi internasional atau rezim dianggap efektif apabila berhasil melakukan fungsinya atau memecahkan permasalahan yang dihadapi. Khususnya permasalahan yang memotifasi berdirinya organisasi tersebut. Dalam mengukur efektivitas dan kinerja suatu organisasi internasional diperlukan beberapa aspek analisis. Ada tiga komponen sebagai variabel independen dalam menentukan efektifitas suau

rezim, yakni tingkat kolaborasi (*level of collaboration*), kegawatan persoalan (*problem malignancy*) dan kapasitas penyelesaian masalah (*problem solving capacity*).¹⁶

1. Tingkat Kolaborasi (Level of Collaboration)

Dalam analisis tingkat kolaborasi rezim, untuk mengukur tingkat kolaborasi suatu rezim diperlukan terlebih dahulu analisis terhadap efektifitas suatu rezim yang ditentukan oleh formula $Er = f(Sr.Cr)+Br$

Keterangan :

Er = Efektifitas Rezim

Sr = Stringency (kekuatan aturan)

Cr = Compliance (ketaatan anggota rezim terhadap aturan)

Br = Efek Samping yang dihasilkan rezim

Menurut Underdal, analisis yang berawal dari output (Sr), outcome (Cr), dan impact (Br) akan menjadi rantai sebab-akibat suatu peristiwa yang mana bisa untuk menjadi titik awal analisis masalah. Output adalah produk rezim berupa seperangkat aturan baru atau aturan dasar yang muncul dari proses pembentukan. Biasanya tertulis tetapi bisa juga tidak tertulis seperti konvensi, rules of laws, deklarasi, norma, prinsip-prinsip dan lainnya. Outcome biasanya berhubungan dengan perubahan perilaku para anggota rezim, dan akan terlihat kebijakan tersebut efektif jika kebijakan tersebut berhasil merubah tingkah laku negara anggota rezim.

Dan Impact adalah respon alami anggota rezim yang mengubah perilaku

¹⁶ Arild Underdal, *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*, tersedia di situs <https://books.google.co.id/books?id=HkOFtdbSZL8C>, diakses pada tanggal 2 Maret 2016, hlm.6

rezim atau manusia dan berhubungan dengan terciptanya situasi tertentu yang didesain atau diinginkan oleh institusi/rezim.

Sehingga data pengukuran output (Sr), outcome (Cr), dan impact (Br) dengan formula $Er = f(Sr.Cr)+Br$ diatas, teori efektivitas rezim dari Arild Underdal memberikan penilaian tingkat kolaborasi skala ordinal, yang mana dijelaskan sebagai berikut :

- a. Point (0) yaitu *Joint deliberation but no joint action* yang berarti anggota rezim bersama dalam musyawarah tapi tidak ada aksi bersama.
- b. Point (1) yaitu *coordination of action on the basis of tacit understanding* yang berarti anggota rezim berkoordinasi bertindak berdasarkan pemahaman sendiri/diam-diam.
- c. Point (2) yaitu *coordination of action on the basis of explicitly formulated rules or standart but with implementation fully in the hand of national government. No centralized appraisal of effectiveness of measure is undertaken* yang berarti anggota rezim bertindak berdasarkan aturan yang secara eksplisit dirumuskan namun dengan pelaksanaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah nasional. Tidak ada penilaian terpusat akan efektifitas tindak-tindakan yang dilakukan.
- d. Point (3) yaitu *same as level 2 but including centralized appraisal* yang berrati memiliki sama seperti tingkat 2 akan tetpai dengan adanya penilaian terpusat.

- e. Point (4) yaitu *coordinated planning combined with national implementation only. Includes centralized appraisal of effectiveness* yang berarti anggota rezim dalam perencanaan terkoordinasi dikombinasikan dengan implementasi nasional.
- f. Point (5) yaitu *coordination through fully integrated planning and implementation, with centralized appraisal of effectiveness* yang berarti koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi dengan didalamnya penilaian efektifitas yang terpusat.

2. Kerumitan/Kegawatan Masalah (*Problem Malignancy*)

Efektif tidaknya suatu rezim ditentukan oleh seberapa gawat persoalan yang dihadapi. Semakin rumit dan gawat suatu persoalan yang dihadapi oleh rezim, maka keefektifan rezim akan semakin kecil pula. Dengan kata lain, jika masalah yang dihadapi suatu rezim semakin bersifat malignancy (gawat), maka kemungkinan terciptanya kerjasama yang efektif akan semakin kecil.

Dengan munculnya suatu permasalahan bisa jadi berasal dari berbagai macam faktor yang kompleks, baik penyebabnya dan aktor-aktor yang ikut didalamnya. Kerumitan masalah pun bisa bersifat eksteren dan interen suatu rezim (organisasi) sehingga diharapkan kapasitas suatu organisasi internasional bisa menyelesaikan sesuai dengan kapasitasnya.

Implementasi Teori

Dalam kenyataannya, kompleksitas konflik yang terjadi di Rwanda adalah besar sehingga UNAMIR (United Nations Mission for Rwanda)

mengalami kendala cukup berarti dalam upayanya memediasi konflik yang terjadi. Faktor-faktor tersebut adalah :

Pertama, Konflik etnis yang terjadi antara suku Hutu dan Tutsi sudah mengakar begitu dalam dihati mereka masing-masing. Dalam teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia baik secara fisik, mental, ekonomi, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi seringkali menjadi inti pembicaraan.¹⁷ Adanya fanatisme dari etnis Hutu muncul tidak lepas dari “sakit hati” dan *reprisal methods* suku Hutu yang mengalami marginalisasi dan stigmasi di masa pendudukan Belgia atas Rwanda dan perang sipil ditahun 1959 menyebabkan konflik Rwanda sulit untuk diselesaikan.¹⁸

Konflik antara dua suku yang terjadi di Rwanda dimulai pada saat Belgia menduduki Rwanda. Saat itu, Belgia menstratifikasi atau membeda-bedakan suku yang ada di Rwanda, yaitu antara Hutu, Tutsi dan juga sekelompok suku kecil yaitu Twa. Belgia membuat Tutsi yang minoritas sebagai superior ketimbang Hutu yang merupakan mayoritas suku di Rwanda. Hal ini didasarkan pada fisik dari suku Tutsi yang terlihat lebih eropa dibandingkan suku Hutu. Suku Tutsi mendapatkan hak-hak dalam pendidikan, pemerintahan, maupun kesehatan, sedangkan suku Hutu tidak.

¹⁷ Sidik Jatmika, *Op. Cit*

¹⁸ Budi Winarmo, *Op.Cit.*

Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan dendam yang begitu dalam bagi suku Hutu dan berusaha untuk mendapatkan hak-hak mereka yang hanya diberikan kepada suku Tutsi. Akibat adanya perbedaan yang dibuat oleh kolonialisme ini juga menyebabkan tidak adanya rasa kebersamaan diantara mereka, dan malah menganggap salah satu suku adalah musuh yang harus disingkirkan. Pasca kemerdekaan Rwanda, pemerintahan telah didominasi oleh suku Hutu dan mereka berusaha mempertahankan kekuasaan tersebut agar tidak kembali jatuh ke tangan suku Tutsi. Namun, suku Tutsi pun tidak mau berdiam diri saja atas ketidakadilan yang didapat dan berusaha kembali mendapatkan hak-hak mereka. Tidak adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Rwanda dengan RPF menjadi kendala besar bagi UNAMIR dalam membantu pengimplementasian perjanjian damai Arusha dan menciptakan perdamaian diantara kedua. Hal karena kebanyakan dari mereka menolak untuk melakukan perdamaian dan pembagian kekuasaan.

Kedua, adanya keterlibatan aktor lain dalam konflik Rwanda yang menyebabkan konflik semakin sulit untuk diselesaikan. Pada tahun 1990 terjadi invansi yang dilakukan RPF terhadap Rwanda. Tujuan RPF melakukan hal ini agar pemerintah Rwanda mau membagi kekuasaanya dengan suku Tutsi. Namun pemerintah Rwanda saat itu menolak hal tersebut. Dengan dukungan dari Perancis pemerintah Rwanda berhasil memukul mundur pasukan RPF. Perancis memberi dukungan terhadap pemerintah Rwanda yang didominasi Hutu untuk terus dapat menguasai

Rwanda. Perancis juga terlibat dalam melatih kelompok interahamwe untuk melakukan genosida di Rwanda.

3. Kapasitas Penyelesaian Masalah (*Problem Solving Capacity*)

Dalam melihat rezim, terdapat usaha dalam membangun kerjasama dan mengimplementasinya. Namun permasalahannya, tingkat keberhasilan atau implementasi dari sebuah rezim bervariasi, terdapat rezim yang dapat dikatakan sukses ataupun gagal. Menurut Arild Underdal dalam bukunya berjudul *One Question Two Answer*, organisasi internasional adalah aktor untuk pemecahan masalah internasional, namun beberapa organisasi internasional termasuk PBB ada yang berhasil dalam menyelesaikan masalah namun ada yang gagal.¹⁹

Penyebabnya ada dua hal, Pertama terdapat pada karakter dari masalah itu sendiri beberapa masalah secara intelektual kurang rumit atau secara politik lebih benign daripada yang lain dan karena itu lebih mudah untuk diselesaikan. Kemungkinan jawaban kedua focus pada *problem-solving capacity*.

Beberapa masalah dipecahkan secara efektif dibandingkan dengan yang lain atau yang mengalami kegagalan karena perangkat institusional yang lebih powerful atau skill dan energy yang lebih besar digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.²⁰ Apabila satu solusi dihasilkan

¹⁹ Didas Nduwayezu, "*The Failure of United Nations Force (UNAMIR) Stop Tutsi Genocide in Rwanda During 1994*", Thesis, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hal.12.

²⁰ Arild Underdal, *Op.Cit.*

melalui keputusan kolektif, maka *problem solving capacity* bisa dipahami sebagai fungsi saling terkait yang terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- a. Pengaturan Kelembagaan (Peraturan)
- b. Distribusi Kekuasaan
- c. Keterampilan dan energi untuk memecahkan masalah yang ada

Pengaturan kelembagaan dalam konsep dasar ilmu sosial yang mengacu pada konstelasi hak dan aturan yang didefinisikan dengan praktek-praktek sosial, pemberian peran dalam suatu agenda, dan panduan dalam berinteraksi diantara mereka yang menempati peran-peran tersebut. Dan aturan-aturab institusi yang kondusif, jelas, tegas dan menjamin implementasi kesepakatan oleh para anggota sehingga sangat diperlukan.

Distribusi kekuasaan menyangkut pada pembagian kekuasaan yang adil dalam sebuah rezim dimana terdapat pihak dominan yang dapat bertindak sebagai leader namun tidak cukup kuat untuk mengabaikan peraturan dan juga ada pihak minoritas yang cukup kuat untuk mengontrol pihak yang dominan, sehingga suatu organisasi benar-benar terlembaga. Dan yang terakhir adalah keterampilan dan eneggy yang tersedia pada suatu rezim untuk memecahkan masalah yang ada.

Implementasi Teori

Problem solving capacity membicarakan efektivitas rezim ditakar dari setting institusional, distribusi kekuasaa serta skill dan energi.

Pertama, Setting Institusional atau pengaturan kelembagaan. PBB sebagai organisasi internasional memiliki asas dan tujuan. Sesuai Piagam

PBB Ada 5 azas yang mendasari organisasi internasional PBB, yaitu Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota, Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota, Penyelesaian sengketa dengan cara damai, Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB, dan PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Adapun Tujuan dari PBB adalah Memelihara perdamaian dan keamanan internasional, Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa, Menciptakan kerja sama dalam memecahkan masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi, dan Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas. Untuk mewujudkan terciptanya keamanan dan perdamaian internasional PBB menunjuk DK PBB sebagai organ utama.

Negara-negara anggota PBB pun harus dapat bekerjasama dan berkontribusi dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan PBB tersebut. Namun, dalam kenyataannya dalam distribusi kekuasaan yang terdapat di PBB ada pihak minoritas yang cukup kuat untuk mengontrol pihak dominan sehingga kemudian mempengaruhi efektifitas PBB maupun DK dalam membuat keputusan untuk bertindak atas suatu permasalahan yang terjadi.

Menurut William D. Coplin²¹ bahwa organisasi internasional bukan hanya sebagai wadah interaksi negara-negara untuk saling bekerjasama dan bersaing, namun juga sebagai lembaga yang mampu membuat keputusan dengan aktor yang berperan sebagai *Policy Influencer*. *Policy Influencer* adalah negara-negara anggota yang memiliki pengaruh karena memiliki kekuatan suara untuk menentukan arah pembuatan keputusan.

Hal ini lah yang kemudian terjadi kepada UNAMIR. Di dalam DK PBB dominasi negara-negara besar menjadi penghambat terhadap efektifitas dalam menjalankan operasi *Peacekeeping*. Dalam pembuatan kebijakan seperti mandat, besar kecilnya operasi, jangkauan dan lamanya operasi yang akan diberikan kepada misi *peacekeeping* selalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan negara besar khususnya negara-negara anggota tetap DK PBB.

Negara-negara besar tersebut tidak memiliki kemauan politik atau *Politic Will* untuk berkontribusi secara finansial maupun militer untuk membantu UNAMIR dalam menyelesaikan konflik yang terjadi sehingga konflik tersebut berlarut-larut hingga terjadinya genosida maupun membantu mengakhiri genosida tersebut. Karena kurangnya dukungan dan peran dari negara-negara besar tersebut menyebabkan UNAMIR tidak leluasa atau mengalami keterbatasan dalam bertindak. UNAMIR seharusnya mendapatkan bantuan tambahan personil, dan logistik untuk dapat mengatasi konflik di Rwanda pada akhirnya tidak mendapatkan hal

²¹ Coplin, William D. *Introduction of International Politik Edisi Kedua*. Terjemahan: Marsedes Marbun, Sinar Baru, Bandung, 1992

itu, malah pasukan UNAMIR di kurangi pada saat situasi semakin memburuk.

D. Hipotesis

Berdasarkan teori yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas. Maka dapat ditarik hipotesis bahwa kegagalan UNAMIR dalam misi perdamaian konflik etnis di Rwanda disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Konflik etnis Rwanda merupakan konflik yang memiliki nilai kerumitan yang tinggi sehingga sulit untuk diselesaikan.
2. Adanya pengaruh yang diberikan negara-negara besar anggota PBB dalam membuat resolusi sehingga UNAMIR mengalami keterbatasan dalam upaya menyelesaikan konflik dan mencegah genosida yang terjadi.

E. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menetapkan batasan jangkauan dalam penelitian. Hal ini sebagai pengingat bagi penulis dalam melakukan penelitian agar tetap disiplin dalam melakukan penelitian dan juga mempermudah penulis dalam penelitian. Penulis membatasi jangkauan penelitian antara tahun 1993-1996. Dibatasi pada saat akhir 1993 karena United Nations Assistance Mission of Rwanda (UNAMIR) di bentuk pada tanggal 5 Oktober 1993 berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 872 (1993) dan 1996 mandat UNAMIR berakhir dengan di tariknya pasukan dari Rwanda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif (deskriptif). Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu persoalan atau permasalahan yang terjadi untuk dicari sebuah kesimpulan yang akurat terhadap kasus yang telah terjadi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang sudah di analisa secara sistematis. Sedangkan, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang tersusun dalam bentuk tidak langsung. Seperti halnya dokumen ataupun literatur yang relevan terkait dengan rumusan masalah yang diteliti

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan yang sumbernya berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian, berupa buku, Jurnal Ilmiah, Laporan Riset, Surat Kabar, website, serta referensi lain yang mendukung.

3. Analisa Data

Analisa data adalah data yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun secara sistematis dan logis. Kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang ada untuk memperoleh jawaban dan sekaligus untuk membuktikan hipotesa
2. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang “Faktor-Faktor Kegagalan UNAMIR (United Nations Assistance Mission for Rwanda”) dalam Misi Perdamaian Konflik Etnis di Rwanda tahun 1993-1996

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, tulisan ini terbagi dalam 5 bab dengan urutan sebagai berikut:

1. Pada Bab satu penulis akan membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, batasan penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Pada Bab kedua penulis akan menjelaskan mengenai dinamika konflik yang terjadi di Rwanda yang berawal dari sejarah konflik etnis di Rwanda hingga terjadinya genosida.
3. Pada Bab ketiga penulis akan menjelaskan mengenai United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) yang meliputi latar belakang keterlibatan PBB di Rwanda, pembentukan dan mandat UNAMIR, serta kegagalan UNAMIR dalam konflik etnis di Rwanda.

4. Pada Bab keempat penulis akan membahas mengenai faktor-faktor kegagalan UNAMIR dalam misi perdamaian konflik etnis di Rwanda
5. Pada Bab kelima akan berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.